

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi telah bergulir lebih dari satu dekade semenjak lengsernya Soeharto pada tahun 1998. Salah satu agenda penting reformasi adalah pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi selama rezim orde baru sampai saat ini. Semua kalangan masyarakat menginginkan agenda mendesak tersebut segera terlaksana dan dituntaskan. Kekuasaan rezim orde baru yang terlalu lama dan absolut telah menumbuhkan perilaku korupsi yang mengakar dan sulit sekali untuk diberantas. Korupsi dan kekuasaan tersebut di atas sesuai dengan ungkapan Acton dalam Djaja (2010: 19) bahwa *“power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely”*.

Korupsi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan orang lain. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, namun lebih luas dari itu adalah memberikan dampak yang negatif kepada masyarakat dan memberikan contoh yang buruk bagi generasi muda. Sektor-sektor yang terindikasi korupsi akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat apalagi apabila terjadi pada lembaga penegak hukum yang seharusnya mencegah dan memberantas korupsi. Korupsi di Indonesia sudah bertransformasi dari tindak pidana biasa menjadi patologi sosial yang sangat berbahaya dan mengancam semua lini kehidupan masyarakat Indonesia. Korupsi yang semakin menggerogoti bangsa ini mencerminkan degradasi moral dan kegagalan proses pendidikan Indonesia saat ini. Korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di seluruh negara di belahan dunia. Korupsi menjadi permasalahan penting di mana pun.

Terdapat beberapa aspek dalam mencegah dan menghilangkan korupsi, karena tidak hanya cukup melihat dari bidang hukum saja, Novitasari (2013: 2) mengungkapkan bahwa *“kekuatan iman pun menjadi salah satu faktor terpenting dalam terbentuknya sikap antikorupsi”*. Sependapat dengan hal tersebut, Atmasasmita (2004: 13) mengungkapkan bahwa *“strategi pemberantasan korupsi*

di Indonesia harus menggunakan empat pendekatan yaitu, pendekatan hukum, pendekatan moralistik dan keimanan, pendekatan edukatif dan pendekatan sosio-kultural.”

Pemberantasan korupsi melalui pendekatan edukatif adalah dengan Pendidikan Antikorupsi (PAk). Pendekatan edukatif dilakukan dengan alasan bahwa gerakan antikorupsi di Indonesia belum maksimal seperti yang diungkapkan oleh Kesuma (2009: 56) bahwa “gerakan antikorupsi Indonesia belum bersifat cukup”. Selanjutnya dikatakan bahwa strategi anti korupsi hendaknya mencakup pendekatan jangka panjang dan jangka pendek, *prevetif* dan *ponitif*, serta *symptom* dan *disease*. Untuk memberantas korupsi diperlukan usaha keras dari semua lapisan masyarakat dan pemangku kebijakan. Secara normatif pemberantasan korupsi di Indonesia dilaksanakan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Intruksi khusus Presiden kesebelas memberikan instruksi kepada mendiknas (sekarang mendikbud) untuk menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan non-formal Hal ini merupakan suatu bentuk dari upaya pemerintahan dalam pemberantasan korupsi yang salah satunya melalui bidang pendidikan

Dalam dunia pendidikan diperlukan pengembangan pembelajaran nilai-nilai anti korupsi yang dimasukan pada seluruh jenjang pendidikan formal, informal maupun nonformal. Nilai-nilai anti korupsi sejatinya menjadi acuan dalam rangka mendidik agar memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi kehidupannya di masa depan yang jauh dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (2008: 2-42) merancang nilai-nilai anti korupsi yang ditanamkan pada siswa, yaitu: (1) tanggung jawab; (2) disiplin; (3) jujur; (4) sederhana; (5) kerja keras; (6) mandiri; (7) adil; (8) berani; (9) peduli.

Sikap-sikap antikorupsi di atas seharusnya dapat diterapkan di sekolah secara konsisten dan berkesinambungan. Namun pada kenyataannya sikap-sikap tersebut seringkali diabaikan. Contohnya adalah siswa dituntut untuk meraih nilai tinggi dalam setiap mata pelajaran. Tidak semua siswa berlaku jujur dengan

belajar, banyak yang melakukan jalan pintas dengan mencontek pada saat ujian. Ketidajujuran inilah yang menjadi pangkal adanya korupsi. Sikap tidak jujur dan perilaku mencontek ini pun berkaitan dengan sikap siswa yang tidak mau untuk bekerja keras dan mandiri serta berani untuk mengungkapkan ide pikirannya dalam ujian. Sikap tidak disiplin, tidak jujur, malas ini yang dapat menyebabkan sikap dan perilaku koruptif siswa. Sikap dan perilaku tersebut akan menjadi tindak pidana korupsi di kemudian hari.

Nilai-nilai antikorupsi tersebut perlu ditanamkan sejak dini dari mulai lingkungan keluarga. Selanjutnya sekolah juga seyogyanya menjadi tempat yang ideal dalam rangka menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Fokus awal pananaman nilai-nilai antikorupsi adalah siswa menghayati, memahami nilai moral, membentuk perilaku sampai kemudian nilai tersebut terbentuk secara internal. Tujuan akhirnya adalah perilaku yang berdasarkan nilai-nilai positif tersebut diterapkan di lingkungan sosial masyarakat. Melihat pada nilai-nilai antikorupsi yang dikemukakan di atas, Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengembangan pembelajaran nilai-nilai anti korupsi. *Good and smart citizen* yang melekat pada Pendidikan Kewarganegaraan menjadi modal sekaligus tantangan untuk mewujudkan hal tersebut untuk menciptakan generasi baru yang terdidik dan anti korupsi.

Hasil penelitian Harmanto (2012: 440) mengenai pandangan siswa terhadap korupsi dan nilai-nilai anti korupsi dipengaruhi oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan, media massa dan internet menunjukkan bahwa “guru mempunyai peran sebagai agen untuk mempengaruhi pandangan siswa tentang korupsi dan antikorupsi”. Selanjutnya tujuan pendidikan antikorupsi di sekolah tidak ditujukan untuk melakukan gerakan praktis dalam pemberantasan korupsi sebagaimana dilakukan oleh penegak hukum, tetapi untuk memberikan pengetahuan dasar tentang korupsi, penyadaran pentingnya sikap antikorupsi sehingga memiliki kepekaan yang kuat terhadap perilaku korupsi serta memiliki sikap antikorupsi melalui pemahaman, keteladanan, dan pembiasaan dalam kegiatan kulikuler dan ekstrakulikuler. Hasil penelitian lain dari Supriatna (2011: 144) mengatakan mengenai internalisasi nilai-nilai antikorupsi, bahwa “semakin

sempurna internalisasi nilai-nilai antikorupsi maka semakin tercipta warga negara muda yang jauh dari perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai korupsi yang akan membawa negara Indonesia kepada suatu keadaan yang lebih baik”.

Dari kedua penelitian terdahulu dapat ditarik benang merah bahwa nilai-nilai antikorupsi perlu terus menerus ditanamkan dalam diri siswa melalui internalisasi, strategi, metode, dan media pembelajaran yang baik sehingga menarik minat siswa dan menciptakan warga negara muda yang antikorupsi. Penanaman nilai dan sikap antikorupsi ini berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran di persekolahan yang mempunyai kontribusi penting dalam membentuk dan mewujudkan karakter bangsa yang dicita-citakan yaitu *smart and good citizenship* seperti ditegaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa aspek kepribadian warganegara yang perlu dikembangkan adalah menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sangat strategis di tengah upaya pemerintah dalam membangun karakter bangsa mulai jenjang Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu instrument yang fundamental dalam bingkai pendidikan nasional sebagai media pembentukan karakter bangsa (Zuriah, 2007:1). Berarti dalam hal ini Pendidikan Kewarganegaraan menanamkan nilai-nilai dan kompetensi yang dimiliki oleh Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara ideal, yaitu *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition*. Pendapat di atas sejalan dengan misi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu untuk mengembangkan warganegara yang demokratis, baik pengetahuan kewarganegaraan, watak atau karakter kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan siswa yang nantinya bermuara pada terbentuknya *good and smart citizenship*. Ketiga kompetensi itu melahirkan *good and smart citizen*. Kestrategisan Pendidikan Kewarganegaraan untuk menanamkan nilai-nilai dapat dimaksimalkan sebagai transmisi nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Melihat dari tujuan pendidikan antikorupsi dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, mempunyai konsentrasi yang sama yakni pada perubahan perilaku utamanya adalah siswa untuk menjunjung tinggi sikap dan perilaku anti korupsi. Pendidikan Antikorupsi merupakan suatu upaya pemerintah dalam menciptakan generasi muda yang bersih dari tindakan tercela atau merusak moral bangsa khususnya Indonesia.

Mengenai kondisi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia saat ini, Winataputra dan Budimansyah (2012) menyatakan bahwa:

PKn di Indonesia pada saat ini belum pada kategori maksimal. namun hanya pada kategori minimal yang hanya mewedahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran kewarganegaraan, bersifat formal, terikat oleh isi, berorientasi pada pengetahuan, menitikberatkan pada proses pengajaran dan hasilnya mudah diukur.

Selanjutnya Winataputra dan Budimansyah (2007:121), mengemukakan permasalahan mendasar dan menjadi penghambat dalam peningkatan kualitas Pendidikan Kewarganegaraan yaitu:

pertama, penggunaan alokasi waktu yang tercantum dalam struktur kurikulum pendidikan dijabarkan secara kaku dan konvensional sebagai jam pelajaran tatap muka di kelas yang sangat dominan, sehingga guru tidak dapat berimprovisasi secara kreatif untuk melakukan aktivitas lainnya selain pembelajaran rutin tatap muka yang terjadwal dengan ketat; *kedua*, pelaksanaan pembelajaran PKn yang lebih didominasi oleh kegiatan peningkatan dimensi kognitif mengakibatkan porsi peningkatan dimensi lainnya menjadi terbengkalai, disamping keterbatasan media pembelajaran; dan *ketiga*, pembelajaran yang terlalu menekankan pada dimensi kognitif berimplikasi pada penilaian yang juga menekankan pada penguasaan kemampuan kognitif saja, sehingga mengakibatkan guru harus selalu mengejar target pencapaian materi.

Berdasarkan pernyataan di atas, setidaknya ada beberapa alasan yang menjadi penghambat kualitas Pendidikan Kewarganegaraan yaitu alokasi waktu, lebih didominasi kognitif dan keterbatasan media pembelajaran. Oleh karena itu untuk sampai pada warga negara ideal dan sebagai pengembangan nilai-nilai anti korupsi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di persekolahan harus didesain sedemikian rupa sehingga konteksnya dapat tercapai. Dengan demikian guru sebagai pendidik di kelas memiliki peranan yang sangat penting untuk

memilih metode yang tepat, mengefektifkan alokasi waktu yang tersedia dan pemanfaatan media pembelajaran yang efektif dan bervariasi yang digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan nilai-nilai antikorupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (2008: 4) mengatakan bahwa:

Pembelajaran afektif masih belum optimal, umumnya masih sebatas pengetahuan kognitif saja belum diaplikasikan, sehingga siswa tidak membiasakan diri berperilaku baik dan benar. Penilaian terhadap siswa secara keseluruhan hendaknya sudah diterapkan dengan berbagai metode atau pendekatan untuk menginformasikan tingkah laku siswa”.

Pernyataan KPK tersebut diatas merupakan sindiran sekaligus sebagai tantangan bagi guru terutama guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk menghasilkan sebuah pendekatan pembelajaran dan media yang tepat untuk mengembangkan nilai-nilai anti korupsi dan menjadikan perilaku baik siswa. Disadari atau tidak pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan saat ini hanya berorientasi konsep kognitif semata dan mengabaikan penanaman nilai.

Guru sebagai fasilitator berperan dalam mengatur proses pembelajaran agar lebih bermakna dan menyenangkan. Peran ini diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa:

proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Guru adalah garda depan dari proses pendidikan, maka selayaknya guru menjadi teladan. Selain sebagai teladan, guru juga mempunyai tugas penting sebagai motivator. Dalam Pendidikan Antikorupsi guru berperan dalam:

- 1) Mengenalkan fenomena korupsi, esensi, alasan, dan konsekuensinya
- 2) Mempromosikan sikap intoleransi terhadap korupsi
- 3) Mendemonstrasikan cara memerangi korupsi (sesuai koridor anak)
- 4) Memberi kontribusi pada kurikulum standar dengan:

- a. Penanaman nilai-nilai
- b. Penguatan kapasitas siswa (seperti: berpikir kritis, tanggungjawab, penyelesaian konflik, memanage dirinya sendiri, dalam berkehidupan sosial disekolah-masyarakat- lingkungan, dll) (Yulita, 2010).

Prakteknya di persekolahan tidak semuanya sesuai dengan harapan di atas. Guru masih terjebak pada pembelajaran berorientasi kognitif semata yang didominasi oleh metode ceramah di kelas dan tanya jawab semata dengan hanya menggunakan buku bahkan hanya menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS). Oleh sebab itu Pendidikan Kewarganegaraan di persekolahan hanya dianggap mata pelajaran hapalan semata yang membosankan dan kurang bermakna bagi kehidupan siswa.

Kurikulum pendidikan Indonesia pada tahun 2013 mengalami revisi dari kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Saruan Pendidikan (KTSP) berubah menjadi Kurikulum 2013. Perubahan ini membawa angin segar bagi pendidikan pada umumnya dan Pendidikan Kewarganegaraan. Kurikulum 2013 terdapat Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi Inti akan menagih kepada tiap mata pelajaran apa yang dapat dikontribusikannya dalam membentuk kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik. Kompetensi Inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi (*organising element*) kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasi. Rumusan Kompetensi Inti dalam kurikulum 2013 ini adalah (1) KI-1 untuk Kompetensi Inti sikap spiritual, (2) KI-2 untuk Kompetensi Inti sikap sosial, (3) KI-3 untuk Kompetensi Inti pengetahuan dan KI-4 untuk Kompetensi Inti keterampilan. Urutan tersebut mengacu pada urutan yang disebutkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dalam mendukung Kompetensi Inti, capaian pembelajaran mata pelajaran diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi dasar. Pencapaian Kompetensi Inti adalah melalui pembelajaran kompetensi dasar yang disampaikan melalui mata pelajaran. Rumusan Kompetensi Dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran.

Iqbal Arpanudin, 2014

Pengaruh Penggunaan Media Video Dengan Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Sikap Antikorupsi Siswa

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pembelajaran bahaya korupsi dan Pendidikan Antikorupsi (PAk) dimuat di dalam KD 3.5 “Menganalisis sistem hukum dan peradilan nasional dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Di dalam Kompetensi Dasar inilah pendidikan anti korupsi dimasukkan di dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan media video dalam pembelajarannya.

Efektifitas suatu proses pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah guru, siswa, materi, metode atau pendekatan dan media pembelajaran serta evaluasi. Dalam hal ini guru dan siswa merupakan dua faktor yang penting atau paling utama dalam pendidikan. Selanjutnya Supriatna (2011: 144) dalam kesimpulan penelitiannya mengatakan bahwa:

tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran PKn yang didorong dengan kesenangan terhadap pembelajaran dengan metode yang memberi peluang lebih kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, memberi peluang terhadap pengembangan nilai-nilai anti korupsi agar ditanamkan dalam kehidupan keseharian siswa.

Selain itu tugas guru sebagai salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran harus mempunyai kreativitas untuk meramu suatu pembelajaran yang disenangi siswa. Faktor penting lainnya yaitu media, media menjadi sarana interaksi antara guru dan siswa dalam memberikan kemudahan untuk menyampaikan materi. Media pembelajaran berperan penting karena dalam pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru sebagai fasilitator dengan siswa sebagai pembelajar. Rahmat (2009:85) mengatakan bahwa “dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan diperlukan saluran (media) agar *message* tersebut tersalurkan secara efektif dan efisien”.

Selanjutnya tugas guru yang tidak kalah pentingnya adalah mencari dan menentukan media pembelajaran dan pendekatan pembelajaran atau metode pembelajaran. di dalam kurikulum 2013 populer penggunaan pendekatan saintifik (*scientific approach*) dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah ini lebih efektif hasilnya dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Hasil penelitian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013: 28) membuktikan bahwa:

pada pembelajaran tradisional, retensi informasi dari guru sebesar 10 persen setelah lima belas menit dan perolehan pemahaman kontekstual sebesar 25 persen. Pada pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, retensi informasi dari guru sebesar lebih dari 90 persen setelah dua hari dan perolehan pemahaman kontekstual sebesar 50-70.

Proses pembelajaran harus dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan ilmiah. Pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013: 12) mengemukakan bahwa proses pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria seperti berikut ini.

- 1) Substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata.
- 2) Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru-peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis.
- 3) Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran.
- 4) Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari substansi atau materi pembelajaran.
- 5) Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon substansi atau materi pembelajaran.
- 6) Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya

Selanjutnya dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mencari dan menentukan media dan sumber belajar sangat penting sebab bahan ajarnya sangat dinamis. Dharma (2012:5) mengatakan fungsi media bahwa “...media dalam kegiatan pembelajaran dianggap tidak hanya sekedar alat bantu, melainkan sebagai pembawa informasi atau pesan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik”. Dengan menggunakan media pembelajaran diharapkan

menimbulkan gairah belajar, proses pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Namun demikian Warsita (2008:281) mengatakan bahwa” tidak ada satu media maupun metode manapun yang berperan sebagai obat mujarab untuk mengatasi seluruh permasalahan pembelajaran”.

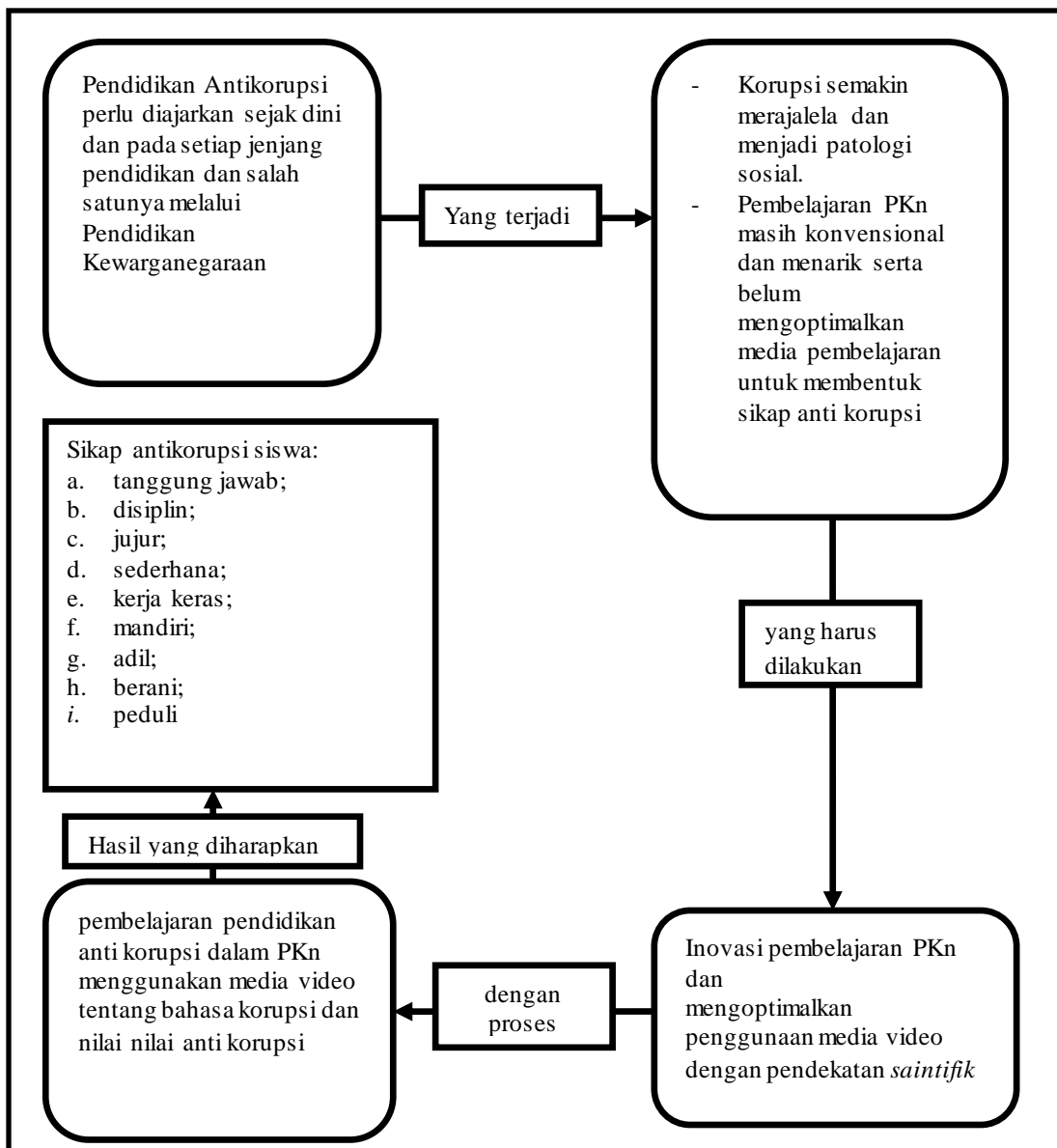
Dalam penelitian Dharma (2012: ix) mengenai penggunaan media pembelajaran interaktif dapat digunakan sebagai salah satu media pembelajaran untuk meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan penelitian di atas menunjukkan bahwa peran media pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan pemahaman materi dan pembentukan sikap dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bagi siswa.

Pembelajaran nilai-nilai anti korupsi di sekolah dengan menggunakan media pembelajaran video dengan pendekatan saintifik diharapkan akan tumbuh gairah belajar dan menimbulkan persepsi yang sama mengenai bahaya korupsi, nilai-nilai antikorupsi yang ditanamkan dan perubahan sikap anti korupsi siswa. Berkaitan dengan pendidikan antikorupsi, berdasarkan Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Upaya Percepatan Pemberantasan Korupsi, SMA Negeri 8 Bandung merupakan salah satu *pilot project* Pendidikan Antikorupsi di Jawa Barat yang masih melaksanakan Pendidikan Antikorupsi dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas, maupun pelajaran lain dan kegiatan ekstrakurikuler. Karena SMA 8 Bandung ini sebagai sekolah percontohan dalam pendidikan antikorupsi, maka dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas ingin dilihat penggunaan media belajar terhadap perubahan sikap anti korupsi siswa. Berdasarkan pada permasalahan di atas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut pengaruh antara media pembelajaran berbasis video dengan pengembangan nilai-nilai anti korupsi siswa di sekolah dengan judul penelitian Pengaruh Penggunaan Media Video Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Sikap Anti Korupsi Siswa (Penelitian Kuasi Eksperimen di kelas X SMA Negeri 8 Bandung).

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Identifikasi Masalah



Sumber: Data Diolah oleh Peneliti, 2014

Secara garis besar berdasarkan pada uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas dapat ditarik rumusan masalah yaitu bagaimanakah pengaruh penggunaan media belajar berbasis video dengan pendekatan saintifik dalam

Iqbal Arpanudin, 2014

Pengaruh Penggunaan Media Video Dengan Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Sikap Antikorupsi Siswa

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap sikap antikorupsi siswa? Agar penelitian lebih terfokus pada masalah, maka masalah di atas dijabarkan ke dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara hasil *pretest* dan *posttest* dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan media video dengan pendekatan saintifik pada kelas eksperimen terhadap sikap antikorupsi siswa?
2. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara hasil *pretest* dan *posttest* dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol terhadap sikap antikorupsi siswa?
3. Apakah terdapat perbedaan antara kelas eksperimen yang menggunakan media video dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran konvensional terhadap sikap antikorupsi siswa?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh . penggunaan media video dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap sikap anti korupsi siswa.

Secara lebih rinci tujuan khususnya adalah untuk mengetahui:

1. Perbedaan antara hasil *pretest* dan *posttest* dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan media video dengan pendekatan saintifik pada kelas eksperimen terhadap sikap anti korupsi siswa.
2. Perbedaan antara hasil *pretest* dan *posttest* dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada kelas kontrol terhadap sikap antikorupsi siswa.
3. Perbedaan sikap antikorupsi antara siswa pada kelas eksperimen yang mendapatkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan media video dengan pendekatan saintifik dengan kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini telah dicapai, diharapkan dapat menghasilkan manfaat yaitu:

1. Diketuainya perbedaan antara hasil *pretest* dan *posttest* dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan media video dengan pendekatan saintifik pada kelas eksperimen terhadap sikap antikorupsi siswa.
2. Diketuainya perbedaan antara hasil *pretest* dan *posttest* dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada kelas kontrol terhadap sikap antikorupsi siswa.
3. Diketuainya perbedaan sikap antikorupsi antara siswa pada kelas eksperimen yang mendapatkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan media video dengan pendekatan saintifik dengan kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional.

Kegunaan teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan untuk memperkaya pengetahuan khususnya dalam pengembangan media pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan nilai-nilai antikorupsi sebagai bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan dan disiplin ilmu yang ditekuni peneliti yaitu Pendidikan Kewarganegaraan.

Kegunaan praktis penelitian ini diantaranya adalah:

1. Guru
Memberikan masukan kepada para pendidik dalam merancang suatu pembelajaran berbasis video terutama dalam hal sikap antikorupsi pada siswa
2. Siswa
Meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku siswa mengenai nilai-nilai antikorupsi dan cara pencegahan korupsi.
3. Sekolah
Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 8 Bandung khususnya dalam hal pemanfaatan media pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

E. Struktur Organisasi Tesis

Bab I menyajikan latar belakang penelitian yang menjadi konteks munculnya masalah, identifikasi perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan struktur organisasi tesis.

Bab II menyajikan kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Kajian pustaka berisi deskripsi, analisis konsep, teori-teori, dan penelitian dahulu yang relevan mengenai penggunaan media pembelajaran video dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap sikap antikorupsi siswa. Kerangka pemikiran merupakan tahapan yang harus ditempuh untuk merumuskan hipotesis dengan mengkaji antarvariabel penelitian.

Bab III menyajikan metodologi penelitian menyajikan lokasi, subjek populasi, sampel penelitian, desain penelitian metode penelitian dan justifikasi penggunaan metode penelitian tersebut, definisi operasional yang dirumuskan dalam setiap indikator, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data dan alasan rasionalnya, serta analisis data.

Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengolahan data atau analisa data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, tujuan penelitian, dan pembahasan atau analisis temuan.

Bab V menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil temuan penelitian. Saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, kepada pengguna hasil penelitian, dan kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.